

Pancasila Education As The Basis For Building and Maintaining The Nation's Character Toward The Era Of Artificial Intelligence

Pendidikan Pancasila Sebagai Dasar Membangun dan Mempertahankan Karakter Bangsa Menuju Era Artificial Intelligence

M. Rizqon Al Musafiri¹, Ahmad Irfan Ilhami²

Universitas Jember¹, Universitas Islam Ibrahimy Genteng²

Keywords :

Pancasila Education; National Character; Artificial Intelligence; Socialization; Society.

Correspondensi Author

M. Rizqon Al Musafiri
Universitas Jember
Email: rizqon@unej.ac.id

History Artikel

Received: 02-03-2026;

Reviewed: 23-03-2026

Revised: 26-03-2026

Accepted: 02-04-2026

Published: 05-04-2026

Abstract. The rapid development of Artificial Intelligence (AI) technology has brought significant changes to various aspects of life, including the threat of erosion of the national character of Indonesian society. This community service activity aims to increase public understanding of the importance of Pancasila Education as the ideological foundation in building and maintaining the nation's character in the era of Artificial Intelligence. The activity was held on February 24, 2026 at PP Al Mubarak Genteng, Banyuwangi Regency, involving 80 participants from various community components including santri, community leaders, and the general public of Genteng District. The method used was socialization through presentation of material covering the concepts of Pancasila values, the challenges of the AI era, and strategies for strengthening national character in the digital era. The results showed that participants gave positive responses and high appreciation for the activity, considering it very helpful in understanding the challenges of the AI era based on Pancasila values. It is concluded that Pancasila Education remains highly relevant as a moral compass in facing the challenges of AI development and needs to be continuously socialized to all levels of society.



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution
4.0 International License*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) pada dekade terakhir berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa dan menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga interaksi sosial, kehadiran AI telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan berpikir (Schwab, 2016). Di satu sisi, AI membawa kemudahan dan efisiensi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun di sisi lain, arus digitalisasi yang masif ini membawa serta risiko serius terhadap identitas dan karakter bangsa, khususnya di kalangan generasi muda Indonesia (Wahyudi, 2021).

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk memiliki fondasi ideologis yang kuat dalam Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, merupakan pedoman hidup yang relevan sepanjang zaman. Namun, derasnya arus informasi global yang dibawa oleh teknologi AI berpotensi mendisrupsi internalisasi nilai-nilai tersebut, terutama jika masyarakat tidak memiliki literasi digital yang memadai dan pemahaman ideologi yang kuat (Iskandar, 2020). Fenomena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa di ruang digital menjadi bukti nyata dari ancaman ini.

Pondok Pesantren (PP) Al Mubarak Genteng merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pusat komunitas masyarakat di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter warga masyarakat. Lokasi PP Al Mubarak yang berada di tengah kecamatan menjadikannya aksesibel bagi berbagai komponen masyarakat, mulai dari santri, tokoh masyarakat, hingga warga umum. Masyarakat Kecamatan Genteng, seperti halnya masyarakat urban-rural lainnya di Indonesia, tengah menghadapi gelombang digitalisasi yang kian deras, namun belum tentu memiliki pemahaman yang cukup tentang cara menyikapinya dengan bijak berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tim pengabdian dari Universitas Jember bersama Universitas Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi merasa perlu untuk melakukan kegiatan sosialisasi Pendidikan Pancasila kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program penguatan sosialisasi pendidikan yang diinisiasi dalam rangka membangun sinergi antara perguruan tinggi, anggota legislatif, dan masyarakat. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dalam konteks era AI; (2) memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang teknologi AI bagi karakter bangsa; dan (3) mendorong masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan ruang digital yang aman, damai, dan bermartabat.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi edukatif yang dirancang untuk dapat menjangkau masyarakat heterogen dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia. Metode sosialisasi dipilih karena dinilai efektif dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan secara langsung kepada khalayak luas dalam waktu yang efisien (Notoatmodjo, 2012). Kegiatan berlangsung dalam satu sesi tatap muka pada tanggal 24 Februari 2026 bertempat di PP Al Mubarak, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Mitra kegiatan adalah masyarakat Kecamatan Genteng dengan total peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: (1) santri PP Al Mubarak Genteng; (2) tokoh masyarakat Kecamatan Genteng; dan (3) masyarakat umum Kecamatan Genteng. Keragaman peserta ini secara sengaja dirancang untuk memaksimalkan jangkauan dampak kegiatan di berbagai lapisan masyarakat. Pemilihan PP Al Mubarak sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas geografis yang berada di tengah Kecamatan Genteng sehingga memudahkan seluruh komponen masyarakat untuk hadir.

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi tiga fase. Fase pertama adalah persiapan, yang mencakup: identifikasi kebutuhan masyarakat terkait literasi digital dan pemahaman nilai Pancasila, penyusunan materi sosialisasi, dan koordinasi dengan pihak PP Al Mubarak serta pemangku kepentingan setempat. Fase kedua adalah pelaksanaan sosialisasi, yang terdiri dari pembukaan dan sambutan, pemaparan materi oleh narasumber, serta sesi diskusi dan tanya jawab. Fase ketiga adalah evaluasi, dilakukan melalui observasi terhadap antusiasme dan respons peserta selama kegiatan berlangsung. Narasumber dalam kegiatan ini adalah M. Rizqon Al Musafiri, M.Pd. dari FKIP Universitas Jember yang memaparkan materi tentang Pendidikan Pancasila dan tantangan era AI, serta Ahmad Irfan Ilhami, M.Sos. dari Universitas Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

Materi sosialisasi mencakup empat pokok bahasan utama: (1) konsep dan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi bangsa; (2) perkembangan teknologi AI dan dampaknya terhadap kehidupan sosial-budaya; (3) ancaman terhadap karakter bangsa di era digital, termasuk hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme daring; serta (4) strategi penguatan karakter bangsa berbasis Pancasila menuju ruang digital yang aman, damai, dan bermartabat. Keberhasilan kegiatan diukur secara kualitatif melalui observasi langsung terhadap tingkat partisipasi, antusiasme peserta, dan kualitas diskusi yang berlangsung selama sesi tanya jawab.

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi berlangsung pada 24 Februari 2026 di PP Al Mubarak Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Dari target awal yang ditetapkan, peserta yang hadir mencapai 80 orang melampaui perkiraan tim pelaksana. Angka ini mengindikasikan bahwa tema yang diangkat memang relevan dan dinantikan oleh masyarakat setempat, terutama di tengah maraknya diskursus publik tentang dampak AI terhadap kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Penguatan Sosialisasi Pendidikan yang dilaksanakan bersama Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan. Sinergi antara unsur perguruan tinggi, legislatif daerah, dan lembaga pesantren terwujud dalam satu forum yang sama, menciptakan ruang diskusi lintas sektor yang jarang terbentuk secara organik. Kolaborasi semacam ini selaras dengan model pentahelix dalam penyelenggaraan pengabdian masyarakat yang menekankan keterlibatan multi-aktor sebagai kunci keberhasilan program pemberdayaan (Carayannis & Campbell, 2009).



Gambar 1. Suasana kegiatan sosialisasi yang dihadiri 80 peserta dari kalangan santri, tokoh masyarakat, dan warga umum Kecamatan Genteng

Sesi pemaparan berjalan dalam suasana yang hidup dan dialogis. Peserta tidak hanya menyimak materi, tetapi juga merespons secara aktif. Pertanyaan yang masuk pada sesi tanya jawab cukup beragam, mulai dari dampak AI terhadap lapangan kerja, potensi penyalahgunaan

deepfake untuk menyebarkan hoaks, hingga cara menyikapi konten digital bermuatan provokasi tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan. Keaktifan semacam ini merupakan indikator kualitatif yang tidak bisa direkayasa; ia muncul ketika audiens merasa topik yang dibahas benar-benar menyentuh kehidupan mereka (Sudjana, 2004).

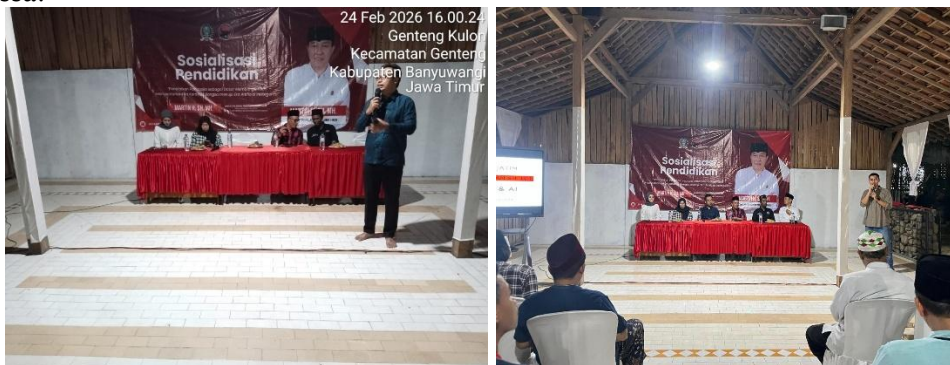
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini juga tidak terlepas dari pemilihan lokasi yang tepat. PP Al Mubarak Genteng merupakan salah satu lembaga pesantren yang memiliki basis massa besar dan kepercayaan tinggi di kalangan masyarakat Kecamatan Genteng. Keputusan untuk menjadikan pesantren sebagai episentrum kegiatan sosialisasi sejalan dengan pandangan Azra (2015) bahwa pesantren di Indonesia telah lama berfungsi bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan agama, melainkan juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan penguatan identitas nasional.

Profil dan Karakteristik Peserta

Peserta kegiatan sosialisasi terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu santri PP Al Mubarak, tokoh masyarakat Kecamatan Genteng, dan warga umum. Keberagaman latar belakang peserta ini menjadi salah satu kekuatan kegiatan, karena menciptakan dinamika diskusi yang kaya perspektif.

Kelompok santri merupakan kelompok terbesar dengan proporsi sekitar 60% dari total peserta. Rentang usia mereka berkisar antara 15 hingga 25 tahun, menjadikan mereka bagian dari generasi Z yang tumbuh bersama teknologi digital. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), penetrasi internet di kalangan usia 15-24 tahun di Indonesia mencapai 88,7%, sehingga pemahaman literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan menjadi sangat krusial bagi kelompok ini.

Tokoh masyarakat yang hadir mencakup pengurus RT/RW, tokoh agama, dan beberapa guru dari sekolah-sekolah di sekitar pesantren. Kelompok ini memegang peran strategis sebagai opinion leader yang dapat meneruskan pesan-pesan kegiatan kepada lingkungan sosial yang lebih luas. Rogers (2003) dalam teori difusi inovasi menjelaskan bahwa opinion leader memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dalam penyebaran ide dan perilaku baru dibandingkan saluran media massa.



Gambar 2. Narasumber memaparkan materi tentang relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi era kecerdasan buatan, disertai slide presentasi interaktif.

Warga umum yang hadir menunjukkan keragaman latar belakang sosial ekonomi, mulai dari ibu rumah tangga, pelaku UMKM, hingga karyawan swasta. Heterogenitas ini justru memperkaya dinamika diskusi, karena setiap kelompok membawa perspektif yang berbeda tentang bagaimana teknologi AI secara konkret mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Respons dan Antusiasme Peserta

Observasi selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa ketiga kelompok peserta memberikan respons yang berbeda nuansanya, namun semuanya positif dan konstruktif.

Para santri PP Al Mubarak menunjukkan antusiasme yang tinggi, khususnya ketika pembahasan menyentuh penggunaan media sosial dan AI. Diskusi sempat diwarnai perdebatan kecil tentang batas antara kreativitas digital dan tanggung jawab moral — sebuah perdebatan yang

justru menunjukkan bahwa mereka sudah berpikir lebih jauh dari sekadar pengguna pasif teknologi. Kondisi ini konsisten dengan temuan Prensky (2001) yang menggambarkan generasi digital native sebagai kelompok yang tidak hanya fasih menggunakan teknologi, tetapi juga mulai kritis terhadap implikasi etis penggunaannya ketika difasilitasi dengan kerangka nilai yang tepat.

Tokoh masyarakat yang hadir melihat kegiatan ini dari sudut pandang berbeda, bukan semata soal teknologinya, tetapi soal fondasi ideologis masyarakat yang menurutnya perlu diperkuat sebelum terpapar lebih dalam pada disrupsi digital. Salah seorang tokoh agama setempat, dalam sesi diskusi, menyatakan bahwa AI bagaikan pisau: berguna di tangan yang tepat, berbahaya di tangan yang salah, dan yang menentukan adalah karakter si pemegang, bukan pisaunya. Analogi sederhana ini menangkap esensi dari materi yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh semua kalangan.

Warga umum, sebagian besar mengaku baru pertama kali mendengar penjelasan sistematis tentang hubungan antara AI dan nilai-nilai Pancasila. Bagi mereka, topik itu selama ini terasa jauh dan abstrak. Setelah mengikuti sesi sosialisasi, beberapa peserta menyatakan bahwa mereka mulai memahami mengapa literasi digital bukan sekadar soal bisa mengoperasikan gawai, melainkan soal kemampuan menilai dan menyikapi konten digital secara kritis dan bertanggung jawab.

Temuan ini konsisten dengan apa yang dicatat Wahyudi (2021): masyarakat Indonesia pada umumnya membutuhkan panduan yang berakar pada kearifan lokal dan nilai ideologis nasional ketika berhadapan dengan percepatan digital. Penelitian Kominfo (2021) juga menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia baru mencapai 3,49 dari skala 5, dengan dimensi etika digital menjadi komponen dengan skor terendah. Kondisi ini menegaskan bahwa intervensi sosialisasi seperti kegiatan ini memiliki dasar kebutuhan yang nyata dan terukur.

Relevansi Pendidikan Pancasila di Era AI

Pertanyaan mendasar yang muncul dalam diskusi sosialisasi dan memang selalu muncul ketika topik ini dibahas adalah: apakah nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan puluhan tahun lalu masih relevan ketika berhadapan dengan teknologi yang tidak mengenal batas wilayah dan tidak terikat identitas nasional manapun? Jawabannya terletak justru di dalam pertanyaan itu sendiri.

Era kecerdasan buatan membawa setidaknya tiga tantangan substantif yang secara langsung bersinggungan dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, tantangan terhadap kebenaran dan kepercayaan (epistemic challenge), di mana teknologi deepfake, disinformasi berbasis AI, dan filter bubble mengancam kemampuan masyarakat untuk membedakan yang nyata dari yang palsu, yang faktual dari yang fabrikasi (Wardle & Derakhshan, 2017). Kedua, tantangan terhadap martabat manusia (anthropological challenge), di mana otomatisasi berbasis AI berpotensi menggantikan jutaan pekerjaan dan mereduksi manusia menjadi sekadar variabel produksi yang dapat disubstitusi (Schwab, 2016). Ketiga, tantangan terhadap keadilan sosial (justice challenge), di mana kesenjangan akses dan kemampuan teknologi antara kelompok masyarakat yang berbeda berpotensi memperlebar jurang ketidaksetaraan yang sudah ada (Warschauer, 2003).

Kelima sila Pancasila memberikan respons yang relevan terhadap ketiga tantangan tersebut. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan landasan spiritual bahwa penggunaan teknologi harus tetap dalam koridor etika dan moralitas yang melampaui kalkulasi untung-rugi semata. Ini bukan argumen anti-teknologi, melainkan pengingat bahwa kemajuan teknis tanpa kemajuan moral adalah ancaman, bukan kemajuan (Kaelan, 2016).

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntun masyarakat untuk menggunakan AI secara humanis. Prinsip ini bersesuaian dengan agenda global AI for Humanity yang diadvokasi oleh UNESCO (2021), yang menegaskan bahwa pengembangan dan penggunaan AI harus menempatkan martabat manusia sebagai nilai tertinggi. Dalam konteks Indonesia, sila kedua menjadi tameng terhadap kecenderungan dehumanisasi digital yang mengikis empati dan solidaritas sosial.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi sangat relevan ketika konten pemecah belah menyebar lebih cepat dari konten pemersatu di ruang digital. Penelitian MIT Media Lab (Vosoughi et al., 2018) menemukan bahwa berita bohong menyebar enam kali lebih cepat dari berita benar di

platform media sosial. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, ini adalah ancaman nyata terhadap kohesi sosial yang harus disikapi dengan literasi digital berbasis nilai persatuan.

Sila keempat mendorong penggunaan teknologi secara demokratis dan partisipatif, menghindari konsentrasi kekuatan digital di tangan segelintir aktor. Sementara sila kelima mengingatkan bahwa keadilan sosial di era digital mensyaratkan pemerataan akses teknologi dan kemampuan literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi mereka yang sudah terhubung (Kemdikbud, 2017).

Lebih jauh, materi sosialisasi menekankan bahwa AI bukan semata ancaman. Platform digital dan teknologi AI dapat dimanfaatkan sebagai media penyebaran nilai-nilai kebangsaan yang menjangkau generasi muda secara lebih efektif. Berbagai konten edukatif, podcast sejarah, dan narasi kebangsaan kini dapat diproduksi dan didistribusikan secara massif menggunakan bantuan AI. Dengan demikian, penguatan literasi digital berbasis Pancasila menjadi agenda yang tidak dapat ditunda lagi dalam konteks ke-Indonesia-an yang tengah menghadapi era kecerdasan buatan.

Kontribusi Kegiatan terhadap Penguatan Karakter Bangsa

Secara operasional, kegiatan ini membekali peserta dengan tiga kapasitas konkret. Pertama, kemampuan mengidentifikasi konten digital yang bertentangan dengan nilai Pancasila, bukan sekadar mengetahui bahwa konten berbahaya itu ada, tetapi mampu mengenali pola dan strategi manipulasinya. Kedua, strategi menjaga kohesi sosial di ruang digital, terutama ketika isu-isu sensitif berbasis identitas seperti suku, agama, ras, dan antargolongan yang muncul dan cenderung membelah opini publik. Ketiga, kesadaran sebagai agen perubahan aktif dalam ekosistem digital, bukan sekadar konsumen pasif konten.

Pesan kunci yang dibawa pulang peserta dirangkum dalam kalimat: 'Bergerak Bersama Mewujudkan Ruang Digital yang Aman, Damai, dan Bermartabat.' Frasa ini mencerminkan semangat gotong royong yakni nilai inti Pancasila yang sudah ada jauh sebelum AI lahir, sebagai pendekatan kolektif dalam menghadapi tantangan digital. Dalam konteks akademis, ini bersesuaian dengan konsep digital citizenship yang dikembangkan oleh Ribble (2015), yang menempatkan tanggung jawab komunal sebagai pilar utama kewarganegaraan digital yang sehat.

Format kegiatan yang mempertemukan santri, tokoh masyarakat, dan warga umum dalam satu ruang juga menciptakan sesuatu yang sulit direplikasi lewat media daring: dialog lintas generasi yang langsung dan tanpa filter. Proses ini sesuai dengan prinsip pendidikan non-formal berbasis komunitas yang menekankan pembelajaran kolektif (participatory learning) sebagai landasan kesadaran sosial (Sudjana, 2004). Knowles (1980) dalam teori andragogi juga menegaskan bahwa orang dewasa belajar paling efektif ketika materi berkaitan langsung dengan kehidupan nyata mereka seperti kondisi yang terpenuhi dalam kegiatan ini.

Model Kolaborasi dan Replikabilitas Program

Satu aspek yang layak mendapat perhatian khusus adalah model kolaborasi yang diterapkan dalam kegiatan ini. Sinergi antara perguruan tinggi (FKIP Universitas Jember), legislatif daerah (DPRD Provinsi Jawa Timur), dan lembaga pesantren (PP Al Mubarak) merepresentasikan pola kemitraan yang melampaui skema pengabdian konvensional yang biasanya hanya melibatkan hubungan bilateral antara perguruan tinggi dan masyarakat penerima manfaat.

Keterlibatan unsur legislatif memberikan dimensi kebijakan pada program ini. Anggota DPRD yang berpartisipasi tidak hanya hadir sebagai tamu undangan, tetapi juga sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat akar rumput dan agenda kebijakan di tingkat provinsi. Dalam jangka panjang, partisipasi legislatif semacam ini berpotensi mendorong pengalokasian anggaran daerah untuk program literasi digital yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Sementara itu, keterlibatan pesantren memberikan legitimasi sosial-kultural yang tidak dapat diperoleh melalui institusi lain. Di Kabupaten Banyuwangi, seperti juga di banyak kabupaten lain di Jawa Timur, pesantren merupakan lembaga dengan modal sosial dan kepercayaan (social trust) yang sangat tinggi di kalangan masyarakat (Azra, 2015). Memanfaatkan infrastruktur sosial

pesantren sebagai platform sosialisasi adalah strategi yang efisien dan efektif sekaligus.

Model kolaborasi tiga pilar ini dapat dijadikan prototipe untuk program serupa di wilayah lain, dengan penyesuaian terhadap konteks lokal masing-masing. Replikabilitas program menjadi salah satu indikator keberhasilan jangka panjang kegiatan pengabdian masyarakat, sebagaimana digariskan dalam standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti (2018).

Implikasi bagi Pengembangan Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan

Temuan dari kegiatan sosialisasi ini memiliki implikasi yang melampaui batas kegiatan pengabdian itu sendiri. Setidaknya ada tiga implikasi yang relevan bagi pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan di tingkat daerah maupun nasional.

Pertama, kegiatan ini memperkuat argumen bahwa Pendidikan Pancasila perlu diintegrasikan secara lebih organik ke dalam pembelajaran literasi digital, bukan sekadar sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Integrasi semacam ini sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan konteks kehidupan nyata (Kemdikbud, 2022). Dalam kerangka Deep Learning yang sedang dikembangkan Kemendikbudristek, pendekatan integratif ini bahkan menjadi salah satu prinsip utama.

Kedua, kegiatan ini menunjukkan efektivitas pendekatan pendidikan berbasis komunitas (community-based education) dalam menjangkau populasi yang tidak terlayani oleh pendidikan formal. Warga umum yang hadir dalam kegiatan ini adalah mereka yang mungkin tidak pernah mendapatkan pembekalan literasi digital dalam setting formal. Karenanya, kanal non-formal berbasis komunitas perlu diperkuat dan didukung secara kebijakan.

Ketiga, kegiatan ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas fasilitator komunitas tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kader karang taruna sebagai agen literasi digital di tingkat akar rumput. Pelatihan bagi para fasilitator ini perlu menjadi komponen integral dari program literasi digital nasional, melengkapi pendekatan top-down yang selama ini lebih dominan.

Sebagai refleksi kritis, kegiatan ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Durasi satu hari belum memungkinkan terjadinya perubahan perilaku digital yang terukur dan berkelanjutan. Sosialisasi, pada dasarnya, hanya tahap pertama dari proses perubahan sosial yang panjang. Evaluasi dampak jangka menengah misalnya melalui survei tindak lanjut tiga bulan setelah kegiatan diperlukan untuk mengukur sejauh mana pesan-pesan sosialisasi benar-benar terinternalisasi dalam praktik digital sehari-hari peserta.

Selain itu, kegiatan ini belum menggunakan instrumen pengukuran pre-test dan post-test yang terstandar, sehingga perubahan pengetahuan dan sikap peserta tidak dapat dikuantifikasi secara ilmiah. Untuk program lanjutan, penggunaan instrumen pengukuran berbasis skala Likert yang telah divalidasi akan memperkuat basis bukti (evidence base) program.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, tim merekomendasikan: (1) penyelenggaraan sesi lanjutan dengan fokus pada praktik langsung penggunaan alat-alat digital secara aman dan bertanggung jawab; (2) pembentukan komunitas belajar (learning community) yang dapat melanjutkan diskusi secara mandiri setelah kegiatan formal berakhir; (3) pengembangan modul literasi digital berbasis Pancasila yang dapat digunakan secara mandiri oleh masyarakat dan disesuaikan dengan konteks lokal Kabupaten Banyuwangi; dan (4) replikasi program di pesantren-pesantren lain di wilayah Jawa Timur dengan melibatkan lebih banyak mitra dari sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil.

Simpulan Dan Saran

Kegiatan sosialisasi Pendidikan Pancasila Sebagai Dasar Membangun dan Mempertahankan Karakter Bangsa Menuju Era Artificial Intelligence telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan yang melibatkan 80 peserta dari berbagai komponen masyarakat Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan era

kecerdasan buatan. Respons peserta yang sangat positif dan antusias mengindikasikan bahwa tema ini memiliki urgensi yang tinggi dan kebutuhan masyarakat yang nyata terhadap sosialisasi semacam ini.

Berdasarkan hasil kegiatan, beberapa saran dikemukakan: (1) perlu adanya kegiatan lanjutan yang lebih terstruktur dengan pengukuran dampak secara kuantitatif melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan sikap peserta; (2) cakupan kegiatan perlu diperluas ke kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki kebutuhan serupa; (3) materi sosialisasi perlu dikembangkan dalam bentuk media digital yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat; dan (4) perlu dibangun program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan untuk memastikan internalisasi nilai-nilai Pancasila di era digital dapat terwujud secara optimal.

Daftar Rujukan

- Azra, A. (2015). *Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3/4), 201–234.
- Iskandar, D. (2020). Ancaman disrupsi digital terhadap identitas dan karakter bangsa Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 187–205. <https://doi.org/10.22146/jkn.55731>
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila (Edisi Reformasi)*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kemdikbud. (2017). *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemdikbud. (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kemenristekdikti. (2018). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII*. Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- Knowles, M. S. (1980). *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*. Englewood Cliffs: Cambridge Adult Education.
- Kominfo. (2021). *Status Literasi Digital Indonesia 2021*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Rineka Cipta.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
- Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know (3rd ed.)*. Eugene: International Society for Technology in Education.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations (5th ed.)*. New York: Free Press.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- Sudjana, D. (2004). *Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung, Asas*. Bandung: Falah Production.
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Paris: UNESCO.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151.
- Wahyudi, A. (2021). Literasi Digital Berbasis Kearifan Lokal: Tantangan dan Peluang di Era Disrupsi. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 21(1), 45–58.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking*. Council of Europe Report DGI(2017)09.
- Warschauer, M. (2003). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. Cambridge: MIT Press.
- Winarno. (2020). *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan: Panduan kuliah di perguruan tinggi (4th ed.)*. Bumi Aksara.
- Yuliani, W., & Purwanto, A. (2022). Pengaruh teknologi kecerdasan buatan terhadap pola

M. Rizqon Al Musafiri, Ahmad Irfan Ilhami. Pendidikan Pancasila Sebagai Dasar Membangun dan Mempertahankan Karakter Bangsa Menuju Era Artificial Intelligence

interaksi sosial masyarakat urban Indonesia. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 5(1), 23–41.
Zubaedi. (2017). *Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Kencana.